



## **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN PUBLIC GOODS PADA KAMPUNG BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN**

**Amat Supriyono, Feni Rosalia**

megister ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas lampung

### **Abstrak**

Public goods adalah barang atau layanan yang disediakan untuk kepentingan umum dan memiliki sifat non-rival serta non-excludable, artinya penggunaannya tidak dapat dibatasi dan tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut menggunakannya. Salah satu public goods yaitu jalan desa, Jalan sebagai barang publik merupakan tanggung jawab pemerintah kampung untuk menyediakan dan memeliharanya agar dapat menunjang mobilitas, akses ekonomi, serta pelayanan sosial bagi masyarakat. kondisi kerusakan jalan yang terjadi di Pemerintah Kampung Bandar Sari, di mana infrastruktur jalan sebagai salah satu public goods mengalami kerusakan yang cukup parah dan menghambat aktivitas masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyediaan infrastruktur jalan di kampung tersebut menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan public goods, khususnya infrastruktur jalan di Desa Bandar Sari. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan infrastruktur jalan masih terbatas, terutama karena ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung, sehingga sering terjadi tumpang tindih regulasi dan kebijakan pembangunan. Dari sisi anggaran, pemerintah kampung hanya mampu mengalokasikan sekitar 7% dari total anggaran desa untuk pembangunan jalan, sehingga penyediaan infrastruktur menjadi tidak optimal. Selain itu, faktor geografis seperti kondisi tanah yang mudah longsor, buruknya sistem drainase, serta rendahnya ketahanan konstruksi jalan turut memperburuk kerusakan infrastruktur dan menghambat upaya perbaikan. Temuan ini menegaskan perlunya kejelasan kewenangan, peningkatan alokasi anggaran, serta strategi pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis desa.

**Kata Kunci:** Publik Goods, pemerintah kampung, Kapasitas.

## PENDAHULUAN

Desa memiliki peran signifikan dalam struktur negara kesatuan republik Indonesia karena sudah ada sejak zaman dahulu sebelum proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan data kementrian dalam negeri dalam lampiran 1 permendagri Nomor 39 tahun 2015 jumlahnya mencapai 75.265 desa. Jumlah desa di Indonesia dengan perkembangan zaman jumlahnya selalu bertambah.

Keberadaan Desa di Indonesia tak terlepas dari Pembangunan. Pembangunan desa dikenal dengan Pembangunan lokal bersekala desa. Terbitnya undang undang desa menjadi sebuah awah harapan desa dalam menentukan peran, posisi dan kewenangan atas urusan des aitu sendiri. Pembangunan lokal bersekala desa merupakan Pembangunan yang yang disarankan pada kewenangan lokal bersekala desa (Faiza Abi,2018), sebagaimana pada undang undang nomor 6 tahun 2014 dalam huruf B. yaitu kewenangan desa dalam melakukan pengaturan serta mengurus kepentingan Masyarakat yang muncul karena Prakasa maupun perkembangan yang diberikan. Kewenangan yang dimiliki desa menjadi sebuah harapan baru untuk desa dalam melaksanakan urusnaya sendi, dengan kewenangan yang dimilkik desa memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan urusanya sendiri termasuk dalam Kapasitas pemerintah dalam penyediaan barang publik.

Masalah kapasitas dalam penyediaan barang *public* di Indonesia masih menjadi masalah yang serius, salah satunya yaitu dalam penyediaan barang publik yang ada di kampung

bandar sari kecamatan way tuba kabupaten way kanan, penyediaan barang publik yaitu jalan mesih menjadi masalah salah satu fenomena masalah yaitu tentang kerusakan jalan yang ada di kampung bandar sari kecamatan way tuba kabupaten way kanan yang tak kunjung di perbaiki, hal ini menjadikan Masyarakat mulai tidak nyaman dengan situasi ini yang semakin lama semakin parah, jaln yang berada di kampung bandar sari merupakan jalan yang kewenaganya berada pada pemerintah kampung dan pemerintah daerah.

Kerusakan jalan di Kampung Bandar Sari semakin parah akibat aktivitas tambang batu yang berlokasi di kampung yang berada di sebelah seelatan kampung Bandar sari. Setiap hari, mobil-mobil pengangkut hasil tambang melintasi jalan kampung ini, menambah beban lalu lintas yang signifikan. Volume kendaraan yang melintas sangat tinggi, sehingga mempercepat kerusakan jalan yang sudah ada.

Kampung Bandar Sari sendiri terletak strategis di tengah beberapa kampung lainnya, menjadikannya jalur vital bagi mobilisasi warga. Dengan tingginya aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar, jalan ini sering digunakan oleh masyarakat dari kampung kampung yang mengapitnya. Akibatnya, tidak hanya kendaraan pengangkut batu yang menyebabkan kerusakan, tetapi juga arus lalu lintas yang padat dari berbagai kegiatan sehari-hari. Kondisi ini membuat jalan di Kampung Bandar Sari menghadapi tantangan serius, Jalan yang semestinya menjadi akses utama bagi masyarakat kini dipenuhi dengan lubang

dan kerusakan, mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara.

Kewenangan pemerintah kampung/desa dalam pembangunan infrastruktur penyediaan publik sangat penting seperti yang di jelaskan dalam undang undang Nomor 6 tahun 2014 kewenangan desa terdiri atas Kewenangan desa tercantum dalam dalam pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan undang undang No 6 tahun 2014 kewengan desa sudah tercantum termasuk dalam Pembangunan insfrastuktur salah satunya yaitu Pembangunan insfrastuktur publik atau bisa dikenal dengan *public goods*. Secara umum, barang publik (*public goods*) biasa dipahami sebagai sesuai yang dibutuhkan semua orang tanpa perlu mengeluarkan biaya. Menurut Yunus (2021) barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi individu tidak akan mengurangi konsumsi akan barang lain orang tersebut. Menurut Paul A. Samuelson (1954), penyediaan barang publik tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar karena akan terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan

barang publik melalui kebijakan fiskal dan regulasi. Dalam pelaksanaannya, penyediaan barang publik di desa sangat terkait dengan empat aspek penting, yaitu kewenangan, anggaran, partisipasi masyarakat, dan kondisi geografis desa.

#### 1. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam kerangka teori

Samuelson, kewenangan menjadi fondasi utama karena pemerintah bertindak sebagai agen kolektif masyarakat yang diberi mandat melalui hukum untuk menyediakan barang publik (Samuelson, 1954). Di Indonesia, hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan, termasuk penyediaan barang publik. Dengan adanya kewenangan hukum, pemerintah desa memiliki legitimasi untuk menentukan prioritas, merancang program, dan mengimplementasikan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat desa (Weber, 1947).

#### 2. Pengelolaan Anggaran untuk Barang Publik

Aspek anggaran sangat penting dalam teori Samuelson, karena penyediaan barang publik memerlukan pengumpulan sumber daya secara kolektif, biasanya melalui pajak atau transfer fiskal (Samuelson, 1954). Dalam konteks desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan instrumen utama untuk membiayai pembangunan dan barang publik desa. Menurut Musgrave (1959), fungsi alokasi pemerintah bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa anggaran desa dialokasikan secara efisien dan transparan untuk barang publik prioritas.

### 3. Partisipasi Masyarakat Desa

Meski Samuelson tidak membahas partisipasi secara eksplisit, namun dalam penyediaan barang publik yang efisien, informasi tentang preferensi masyarakat sangat dibutuhkan. Proses ini secara praktis tercermin dalam mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa (musdes) atau musrenbangdes, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan menetapkan skala prioritas Sherry Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi warga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif, adil, dan tepat sasaran. Partisipasi memperkuat legitimasi keputusan dan meningkatkan efektivitas program barang publik desa.

### 4. Kondisi Geografis Desa

Dalam teori ekonomi regional, disparitas geografis merupakan tantangan dalam penyediaan barang publik. Teori Samuelson dapat diperluas melalui pendekatan Paul Krugman (1991) dan Walter Isard (1960) yang menekankan pentingnya pertimbangan geografis dalam distribusi sumber daya publik. Teori Samuelson memberikan landasan teoretis yang kuat bahwa penyediaan barang publik memerlukan campur tangan pemerintah karena kegagalan pasar. Dalam konteks desa, keberhasilan penyediaan barang publik sangat bergantung pada kewenangan pemerintah desa, dukungan anggaran yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, serta perhatian terhadap kondisi geografis yang unik di setiap desa. Oleh karena itu, integrasi keempat aspek ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada kapasitas

pemerintah desa dalam penyediaan *publik goods* studi pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini berfokus pada empat aspek yaitu

- 1 kewenangan pemerintah desa
- 2 keuangan pemerintah desa
- 3 partisipasi masyarakat
- 4 geografi/ kondisi wilayah

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas pemerintah desa/Kampung memiliki peran sentral dalam Pembangunan jalan desa/kampung sebagai Upaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan memperkuat koneksi antar wilayah. Dari hasil analisis yang dilakukan di kampung bandar sari kecamatan way tuba kabupaten way kanan terhadap penyediaan public goods yaitu jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kampung terdapat empat aspek menurut paulsamuelson antara lain yaitu kewenangan, anggaran partisipasi dan konsisi geografi.

#### Kapasitas Kewenangan

Kewenangan pemerintah tidak hanya berada pada Tingkat pusat melainkan juga melekat pada pemerintah kampung yang merupakan unit penyelenggaraan terkecil pada pemerintahan yang ada pada negara kesatuan republik Indonesia. Kewenangan desa di atur dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 melalui regulasi ini desa/kampung di berikan otonomi untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan Pembangunan insfrastuktur desa, termasuk jalan jalan desa/kampung. Seperti yang ada pada pasal 1 Ayat 5, dan pasal 17 UndangUndang No 6 tahun 2014 sudah jelas kewenangan yang di berikan untuk desa/kampung khususnya dalam penyediaan barang publik yaitu jalan salah satunya.

Namun, Dalam pelaksanaan kewenangan yang ada pada pemerintah

kampung seringkali terbatas oleh regulasi yang di tetapkan oleh pemerintaah pusat atau daerah, sperti pembatasan penggunaan anggaran untuk pembangunan insprastuktur fisik maupun non fisik yang sudah diatur penggunaanya dan juga masih ada intervensi anggaran dari pemerintah daerah salah satu contohnya yaitu program program prioritas dari pemerintah pusat yang menggunakan atau intervensi anggaran desa/kampung hal ini menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kampung menjadi terbatas. Kewengan desa/kampung dalam penyediaan *public goods* pada Tingkat lokal kususny yang terjadi pada kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan berada pada posisi tidak optimal karena bersifat paersial dan belum didelegasikan secara jelas oleh pemerintah daerah. Meskipun regulasi yang ada memberikan ruang untuk mengatur menurus kepentinganya Masyarakat setempat, praktiknya intervensi dari berbagai pihak masih terjadi pada pemerintah kampung baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

### **Faktor faktor dalam penyediaan *public goods***

Dalam penyediaan publik goods pada pemerintah kampung bandar sari terdapat tiga yaitu anggaran, partisipasi, dan kondisi geografis.

#### **1. Anggaran**

Anggaran merupakan penting dalam Pembangunan kususny dalam penyediaan *public goods* jalan kampung. Keterbatasan anggaran dalam penyediaan jalan terjadi pada pemerintahan kampung bandar sari kecamatan way tuba kabupaten way kanan. Dari total keseluruhan pendapatan kampung yang ada yaitu pada tahun 2024 APB Desa yaitu sebesar Rp. 1.430.644.215, atau jika di

gambarkan dengan diagram sebagai berikut ini



dana desa (DD) menjadi sumber utama dengan kontribusi sebesar 61,30%, dari jumlah tersebut, alokasi untuk bidang pelaksanaan Pembangunan desa sebesar Rp. 385.080.000 atau sebesar 26,92% dari total pendapatan yang ada. Lebih rinci untuk Pembangunan yang berkaitan dengan jalan yaitu dalam laporan keungan yang ada yaitu sebesar Rp. 101.520.000 atau sekitar 7,09% dari yang diperuntukan untuk Pembangunan fisik seperti jalan desa, gorong gorong, dan selokan. Jika digambarkan dalam persentase antara lain sebagai berikut:



#### **2. Partisipasi**

Partisipasi Masyarakat merupakan komponen yang penting dalam penyediaan *public goods* salah satunya dalam pembanguan jalan kampung. Masyarakat kampung bandar sari menunjukan partisipasi yang kuat

dalam Pembangunan jalan kampung yang berupa gotong royong yang dilakukan dalam perbaikan jalan yang ada. Namun walaupun kontribusi yang kuat dalam sumbangan pemikiran Masyarakat dan wujud gotong royong tantangan muncul pada minimnya kontribusi swadaya Masyarakat serta keterbatasan anggaran yang ada selain itu juga kurangnya partisipasi pihak swasta yang berupa CSR yang minim dalam partisipasi dalam penyediaan jalan kampung.

### 3. Kondisi geografis

Kondisi geografis Kampung Bandar Sari yang sangat beragam menjadi penyediaan *publik goods*/ jalan kampung juga menjadialah satu faktor, Sebagian kondisi tanah yang kurang rata dan kondisi tanah merah menjadikan jalan cepat rusak selain hal itu kondisi drainase yang buruk ini juga menjadi faktor kerusakan *publik goods* yang ada, dengan salah satu dengan kondisi seperti dokumentasi hasil observasi yang dilakukan.



Kondisi drainase saat terjadinya hujan air yang mengalir sampai kejalan ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan jalan semakin lama rusak karena terkikis oleh air yang mengalir saat hujan deras.

## SIMPULAN

kapasitas pemerintah kampung bandar sari dalam penyediaan infrastruktur jalan/ *publik goods* masih sangat terbatas akibat beberapa faktor struktural dan kelembagaan. Pertama ketidakjelasan batas kewenangan antara

pemerintah daerah dengan pemerintah kampung menyebabkan tumpang tindih dalam pembanguna, sehingga pemerintah kampung tidak memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan fungsi dalam penyediaan *publik goods*. Kedua masih ada intervensinya pemerintah daerah dalam anggaran kampung dan berdampak pada terbatasnya Pembangunan infrastruktur karena Sebagian anggaran dialihkan untuk program program prioritas dari pemerintah pusat/ daerah.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penyediaan *public goods* pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan antara lain:

1. Ketersediaan Anggaran
2. Partisipasi
3. Kondisi geografis

Dengan terbatasnya penyediaan *public goods* kampung bandar sari dari hasil analisis penelitian ini ada beberapa saran yang bisa dilakukan oleh pemerintah kampung antara lain sebagai berikut:

1. Penegasan batas kewenangan pemerintah kampung dan pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan Pembangunan jalan terlebih lagi jalan kampung yang memiliki skala besar sebaiknya ditarik kewenaganya oleh pemerintah daerah.

2. Penguatan mekanisme anggaran untuk mencegah intervensi yang menghambat kinerja kampung/desa dan tidak ada intervensi langsung terhadap alokasi anggaran.

3. Pengembangan kemandirian keuangan desa melalui penguatan pendapatan asli desa (PAD)

## DAFTAR PUSTAKA

Abi, Z. F. (2018). *Dualisme Pengaturan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Perspektif Ta'arudh Al-Adillah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Asha, A. (2014). Capacity Challenges for Local Government Efficacy for Development Planning and Implementation. *Journal of Public Administration*, 49(3), 803–812.
- Astuti, D. S. I. (2011). *Desentralisasi and Participation Society in Education*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Cavaye, J. (2012). Community Resilience and Community Development: What Mutual Opportunities Arise from Interactions between the two concepts? *Community Development for Times of Crisis*, 75–96.
- Dwi, S. H. M., & Abdi, I. N. (2019). *Tinjauan Perencanaan Struktur Tangga pada Proyek Pembangunan Gedung Dekanat FIB Universitas Udayana*. Politeknik Negeri Bali.
- Dwipayana, A. A. G. N. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Gramedia Pustaka.
- Faiza, A. (2018). *Arus Metamorfosa Milenial*. Penerbit Ernest.
- Ma'rifah, N. (2017). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 135–146.
- Mardiasmo, W. J. (1999). *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik, (Managing Public-Oriented Regional Finance)*. Yogyakarta: Kompak STIE YO Indonesia.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran.
- Musgrave, R. A. (1959). Taxes and the Budget. *Challenge*, 8(2), 18–22.
- Muslimin, B. P. (2021). *Penyediaan Barang Publik Oleh Pemerintah*. Kiprah Kader KAHMI Di Medan Perjuangan: Setangkai Bunga Rampai.
- Nihla, N., Nursam, N., Kahar, A., & Arfan, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa Mendukung Pembangunan Jalan di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 11–14.
- Puspitasari, D. C. (2015). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 330–341.
- Rahyunir, R. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta. Nusa Media.
- Robert, C. (1988). *the Sociology of Development Series*. Taylor & Francis.
- Sari, D. P. (2015). Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 11(3), 299–312.
- Sari, W. (2016). *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sembel, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Septiana, W. (2015). Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 55–64.
- Siagian, S. P. (1981). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Gita Karya.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan* (4th ed.). Gunung Agung.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara.
- Sufian, H. (2003). *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Kencana.
- Sugiyah, S. (2001). *Partisipasi Masyarakat dalam Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryanto, G. M. (1987). *Manajemen*

*Pembangunan*. Kencana Pranada Media Group.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Ghalia Indonesia.

Widjaja, A. W. (2003). *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada.

Yunus, R. (2021). *Ekonomi Publik*. Penerbit NEM.